



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 137.03.2.692968/2025**



DS:1007-5076-2509-6223

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 03

Tanggal : 14 Mei 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (137)	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
2. Unit Organisasi	: (03)	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
3. Provinsi	: (19)	SULAWESI SELATAN
4. Kode>Nama Satker	: (692968)	RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR
Sebesar	: Rp. 8.858.304.000	(DELAPAN MILIAR DELAPAN RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.90	KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	5.287.926.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	3.570.378.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MAKASSAR II	(136) Rp.	8.858.304.000
---------------------	-----------	---------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 137.03.2.692968/2025



DS:1007-5076-2509-6223

Satker : (692968) RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR

BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	2.249.086.000
BF.6161	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp.	2.249.086.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	6.609.218.000
WA.6163	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	Rp.	6.609.218.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 137.03.2.692968/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1007-5076-2509-6223

Kementerian Negara/Lembaga : (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (692968) RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR

Halaman : I A. 1

Program	:	137.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			2.249.086.000
Kegiatan	:	6161	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah			2.249.086.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima			
		2. 01	Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani			
		3. 02	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	6161.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	1.710,00	Orang	2.249.086.000
Rincian Output	:	01 BIB.001	Tindakan Administratif Keimigrasian	10,00	Orang	652.082.000
		02 BIB.003	Pengawasan Pengungsi	1700,00	Orang	1.597.004.000
Program	:	137.03.WA	Program Dukungan Manajemen			6.609.218.000
Kegiatan	:	6163	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah			6.609.218.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi			
		2. 02	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	6163.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	5.796.889.000
Rincian Output	:	01 EBA.956	Layanan BMN	1,00	Layanan	10.000.000
		02 EBA.962	Layanan Umum	1,00	Layanan	222.871.000
		03 EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	276.092.000
		04 EBA.994	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	5.287.926.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	6163.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	5,00	Unit, m2, Paket	133.919.000
Rincian Output	:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	5,00	Unit	133.919.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 137.03.2.692968/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1007-5076-2509-6223

Kementerian Negara/Lembaga : (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (692968) RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR

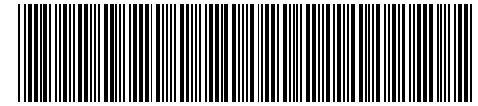
Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	3	:	6163.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	213.324.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	1.00	Layanan	213.324.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	6163.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	465.086.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Layanan	170.874.000
		:	02	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Layanan	78.396.000
		:	03	EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	1.00	Layanan	215.816.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

ttd.
Agus Andrianto

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 137.03.2.692968/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



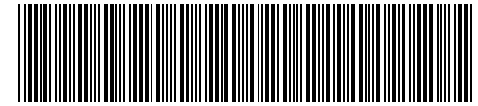
DS:1007-5076-2509-6223

Kementerian Negara/Lembaga : (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (692968) RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692968	RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR	3.599.935	5.124.450	133.919	-	-	8.858.304		
137.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.249.086	-	-	-	2.249.086		
6161	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	-	2.249.086	-	-	-	2.249.086		
6161.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	2.249.086	-	-	-	2.249.086	19 . 51	
04	PNBP	-	2.249.086	-	-	-	2.249.086	136@	
137.03.WA	Program Dukungan Manajemen	3.599.935	2.875.364	133.919	-	-	6.609.218		
6163	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	3.599.935	2.875.364	133.919	-	-	6.609.218		
6163.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	3.599.935	2.196.954	-	-	-	5.796.889	19 . 51	
01	RM	3.599.935	1.687.991	-	-	-	5.287.926	136@	
04	PNBP	-	508.963	-	-	-	508.963	136@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 137.03.2.692968/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1007-5076-2509-6223

Kementerian Negara/Lembaga : (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (692968) RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR
Kewenangan : (KD)

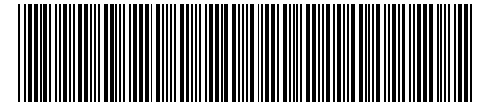
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6163.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	-	133.919	-	-	133.919	19 . 51	
04	PNBP	-	-	133.919	-	-	133.919	136@	
6163.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	213.324	-	-	-	213.324	19 . 51	
04	PNBP	-	213.324	-	-	-	213.324	136@	
6163.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	465.086	-	-	-	465.086	19 . 51	
04	PNBP	-	465.086	-	-	-	465.086	136@	
JUMLAH		3.599.935	5.124.450	133.919	-	-	8.858.304		

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan

ttd.
Agus Andrianto

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 137.03.2.692968/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1007-5076-2509-6223

Kementerian Negara/Lembaga : (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (692968) RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR

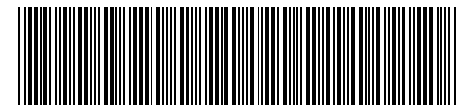
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692968	RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR													
		RENCANA PENARIKAN DANA	219.679	388.556	717.589	610.394	735.359	993.367	724.970	678.000	798.796	601.854	673.568	1.716.174	8.858.304
		BELANJA PEGAWAI	219.679	254.309	479.773	254.000	256.421	473.524	294.806	256.421	256.421	256.421	256.421	341.740	3.599.935
		BELANJA BARANG	0	134.246	237.816	356.394	478.938	437.286	430.164	421.579	542.375	345.434	365.785	1.374.434	5.124.450
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	82.557	0	0	0	0	51.362	0	133.919
	137.03.BF.6161	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	0	89.346	15.104	171.827	318.183	284.210	215.728	215.728	211.688	151.724	137.798	437.749	2.249.086
	137.03.WA.6163	52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	89.346	15.104	171.827	318.183	284.210	215.728	215.728	211.688	151.724	137.798	437.749	2.249.086
		Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	219.679	299.209	702.485	438.567	417.175	709.157	509.242	462.271	587.108	450.130	535.770	1.278.425	6.609.218
		51 BELANJA PEGAWAI	219.679	254.309	479.773	254.000	256.421	473.524	294.806	256.421	256.421	256.421	256.421	341.740	3.599.935
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	44.900	222.711	184.567	160.755	153.076	214.435	205.851	330.687	193.709	227.987	936.685	2.875.364
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	82.557	0	0	0	0	51.362	0	133.919

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan

ttd.
Agus Andrianto

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 137.03.2.692968/2025
IV A. B L O K I R**



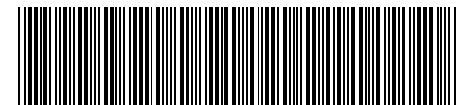
DS:1007-5076-2509-6223

Kementerian Negara/Lembaga : [137] KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [692968] RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692968	RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 761.703 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 2.450.417		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 2.401.871	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	53 Belanja Modal Rp. 48.546		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 149.100 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
137.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
6161	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	137.03.WA	Program Dukungan Manajemen
6161.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	6163	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah
	521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh(PNBP)	6163.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 32.152 Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025	521111	Belanja Keperluan Perkantoran(RM)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 141.740 Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025
521211	Belanja Bahan(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 63.600 Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat(RM)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 600 Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.500 Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya(RM)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.400 Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.000 Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025	521211	Belanja Bahan(RM)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.400 Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025
522191	Belanja Jasa Lainnya(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.800 Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025	521211	Belanja Bahan(PNBP)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 64.100 Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 137.03.2.692968/2025
IV A. B L O K I R**



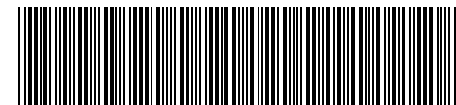
DS:1007-5076-2509-6223

Kementerian Negara/Lembaga : [137] KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [692968] RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
521213	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 400 Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025	522151	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Jasa Profesi(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.000 Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025
521219	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 81.000 Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025	523111	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 249.000 Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025
521811	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 35.270 Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025	523112	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 62.697 Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025
522111	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Langganan Listrik(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 72.000 Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025	523121	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 114.457 Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025
522112	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Langganan Telepon(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.200 Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025	524111	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 100.820 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
522113	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Langganan Air(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 20.000 Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025	524113	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.150 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
522141	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Sewa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.000 Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025	524119	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 30.980 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 137.03.2.692968/2025
IV A. B L O K I R**



DS:1007-5076-2509-6223

Kementerian Negara/Lembaga : [137] KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [692968] RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR

Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6163.EBB	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.100 Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025
	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 48.546 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
6163.EBC	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Layanan Manajemen SDM Internal		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 191.585 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	521211 Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.400 Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.025 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 97.500 Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.480 Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.537 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.175 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
6163.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan

ttd.
Agus Andrianto

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 137.03.2.692968/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:1007-5076-2509-6223

Kementerian Negara/Lembaga : [137] KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [692968] RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan

ttd.
Agus Andrianto